

BAB III

KEBIJAKAN INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI LIBYA

Negara yang kaya dengan hasil buminya akan dapat mensejahterakan rakyatnya walaupun dengan berbagai pertimbangan pemimpin harus pro terhadap rakyat dan mementingkan kebutuhan rakyat, namun berbeda dengan Libya yang mana pemerintahan dan rakyat saling berbeda haluan, sehingga menghasilkan konflik yang tak terhindarkan. Hal ini menjadikan negara-negara lain turut merespon gejolak politik ini. Amerika Serikat seakan peduli sepenuhnya terhadap rakyat Libya dengan konflik yang ada. Maka dewan keamanan PBB membukakan jalan untuk Amerika Serikat guna melakukan intervensi di Libya dengan dalih HAM. Namun yang menjadi masalah AS melakukan intervensi di Libya bukan untuk HAM akan tetapi lebih dari itu yaitu terkait kebijakan politik dan ekonomi di Libya.

A. AWAL MULA KONFLIK INTERNAL DI LIBYA

Libya sejak merdeka telah mengalami tiga perubahan bentuk pemerintahan, pertama: bentuk Monarki (*Kerajaan*), kedua: Republika, ketiga: Sosial Republik. Dan dalam rentang sejarahnya selama 58 tahun sejak merdeka hingga sekarang pun politik Libya banyak mengalami pasang surut, Ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan bagi rakyat Libya sekarang ini dalam menghadapi tekanan dan kekejaman dari

pemimpinnya sendiri. Muammar Khadafi telah menjatuhkan banyak korban demi mempertahankan kekuasaannya bahkan dia tetap berjuang sampai titik darah penghabisan demi kekuasaan.

Konflik Libya yang diistilahkan oleh beberapa media sebagai perang saudara (*civil war*) adalah konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara kubu islamis Libya dan lawan-lawan politik mereka dari kubu sekuler sejak 2014. Dari sisi politik, golongan penerus rezim Qadzaifi bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama, golongan nasionalis yang ingin menjadikan Libya sebagai negara sekuler dan golongan islamis yang ingin mengubah negara menjadi negara yang berbasis Syariah. Kedua golongan ini masing-masingnya juga bisa dibedakan lagi menjadi golongan sentralis (yang menginginkan agar pemerintah pusat memiliki kontrol kuat ke daerah) dan golongan federalis (yang menginginkan otonomi luas di daerah).

Puncak krisis Libya terjadi pada bulan Februari 2011 yang dipicu oleh munculnya demonstrasi dan pemberontakan akibat tidak adanya kebebasan dan faktor ekonomi. Kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, angka pengangguran yang semakin tinggi, membuat rakyat Libya kecewa dengan pemerintahan Khaddafi yang telah memerintah selama lebih dari 41 tahun. Dan menganggap Khaddafi melakukan korupsi selama pemerintahannya. Kaddafi dianggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat, misalnya pendapatan negara dari minyak yang justru masuk ke dalam pundi-pundi Qadhafi sendiri dan tidak disalurkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Khadafi bisa dibilang bersifat nepotisme. Khaddafi membentuk sekumpulan orang yang berkuasa di negaranya

berdasarkan saudara dan keluarganya sehingga ia dapat mengatur negara ditangannya. Khaddafi adalah seorang yang tak menepati janjinya terhadap rakyat-rakyatnya. Sewaktu Khaddafi mengambil kekuasaan dari Raja Idris pada tahun 1969, ia pernah menjanjikan akan mengadakan revolusi bagi negaranya. Namun setelah berjalan sampai sekarang revolusi tersebut hanya sebagai hisapan jempol belaka dan tidak merubah apa yang telah dijalankan oleh Raja Idris sebelumnya. Semua penguasa seakan lupa dengan janjinya dan membiarkan rakyatnya. Rakyat hidup sendiri tanpa ada bantuan dan perlindungan dari pemerintahannya. Bahkan yang mereka dapatkan hanyalah semburan peluru dari senjata-senjata para penguasa dan keluarga yang melindungi kekuasaannya.¹

Krisis politik di Libya menjadi semakin rumit karena rakyat Libya terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu loyalis Khaddafi dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh *National Transition Council* (NTC). Kedua kubu tersebut memiliki kepentingan yang kontradiktif, dimana kubu loyalis Khaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Khaddafi, sementara kubu oposisi menginginkan Khaddafi turun dari jabatannya. Akhirnya, Khaddafi mengecam gerakan rakyat oposisi tersebut sebagai gerakan revolusioner, sehingga Khaddafi secara represif mengerahkan tentara untuk menembaki para demonstran yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh. Adanya serangan pemerintah Khaddafi terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan. PBB pun mengeluarkan resolusi 1973 yang mengizinkan negara anggota PBB untuk menjalankan langkah apapun yang diperlukan

¹ <https://wordpress.com/2013/07/31/tragedi-libya-di-bawah-pimpinan-moammar-khadafi/>

dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah Khaddafi.²

Dampak dari krisis di Libya tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Libya, tapi juga oleh masyarakat dunia, yakni terutama dalam hal pasokan energi minyak dan gas dunia. Banyak perusahaan minyak yang berinvestasi disana menghentikan produksi. Harga minyak di pasaran dunia pun mengalami kenaikan. Libya memang memiliki peran teramat penting bagi keamanan energi dunia, terutama bagi negara-negara Barat (AS dan Eropa) yang sangat tergantung dengan pasokan minyak dari Libya. Adanya krisis politik menyebabkan tidak terjaminnya pasokan minyak bagi kepentingan mereka.

1. Respon Amerika Serikat

Kebijakan Amerika Serikat dan tujuan kebijakan Amerika Serikat terhadap Libya dilakukan melalui tiga administrasi.

- Tujuan Amerika Serikat adalah untuk menghentikan dukungan Libya terhadap terorisme,
- Mencegah kemampuan Tripoli untuk menghasilkan senjata pemusnah massal, dan menahan ambisi regional Qadhafi.
- Kemudian Amerika Serikat menambah beberapa tujuan lain, termasuk tanggungjawab terhadap keadilan.

² Azra, A, 2011. "Anatomi Krisis Libya, Yaman, Bahrain" [online]. dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/25/03120395/Anatomi.Krisis.Libya.Yaman.Bahrain>

Sebelum rezim Khaddafi memerintah di Libya, Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik dengan Libya dengan membawa kepentingan operasional pangkalan militer dan kepentingan minyak di Libya. Namun, setelah pemerintahan dipegang oleh rezim Khaddafi pada 1969, hubungan Amerika Serikat dan Libya berangsur surut. Rezim Khaddafi pun dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tersebut, sehingga *concern* pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat didominasi oleh isu-isu terkait Libya.

Menanggapi krisis Libya tersebut, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Barack Obama menyusun strategi, yakni menggunakan kekuatan militer sebagai *last resort* dan berkoalisi dengan pihak yang lebih luas, serta mendapat legitimasi dari Dewan Keamanan PBB. Dengan strategi tersebut, Amerika Serikat memiliki tujuan jangka pendek yakni untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Muammar Khaddafi terhadap rakyat sipil Libya, serta tujuan jangka panjang untuk melengserkan Khaddafi dari kepemimpinannya di Libya. Amerika Serikat pun berhasil mencapai kedua tujuan tersebut melalui kebijakan *humanitarian intervention*. *Humanitarian intervention* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Libya sangat menekankan norma *Responsibility to Protect* (RtoP) yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama kepemimpinan Qadhafi.³ Amerika Serikat sangat mendukung hak universal rakyat Libya. Termasuk di dalamnya hak untuk berkumpul, mengemukakan pendapat, dan menentukan nasib sendiri. Ini adalah hak asasi manusia. Tidak bisa

³ Ibid

ditawar-tawar lagi. Hal ini harus dihormati disemua negara dan tidak bisa dilawan dengan kekerasan ataupun tekanan. Obama juga mengumumkan akan mengirim Menlu Clinton ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri pertemuan dewan HAM PBB untuk membicarakan kekerasan di Libya. PBB pada pertemuan nanti akan mengeluarkan resolusi terhadap Libya.⁴ Kemudian pada 4 Agustus 2011, pemerintahan Obama mengeluarkan *Presidential Study Directive on Mass Atrocities* (PSD-10). PSD-10 mendefinisikan *mass atrocities* sebagai inti kepentingan akan keamanan nasional dan inti tanggung jawab moral dari Amerika Serikat. PSD-10 ini mencakup beberapa tindakan dalam menghadapi *mass atrocities* seperti tidak bertindak sama sekali, diplomasi preventif, sanksi ekonomi dan finansial, embargo senjata dan tindakan pemaksaan.⁵

Selain itu, Amerika Serikat menggunakan strategi intervensi militer di Libya dengan dalih kemanusiaan, yakni *Operation Odyssey Dawn*. Operasi militer ini dilaksanakan sebagai bentuk *enforcement* dari resolusi PBB 1973, yang diadopsi pada 17 Maret 2011, yakni Bab VII dari Piagam PBB. Operasi militer AS di Libya juga disebut dengan *Operation Odyssey Dawn* (OOD) yang didefinisikan oleh James G. Foggo dan Michael Beer (2013: 92) sebagai respon yang dikeluarkan oleh AS atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang menyerukan adanya pembentukan sebuah *no-fly zone* di atas Libya dan perlindungan warga sipil dari ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh militer yang digerakan oleh rezim Qadhafi. OOD ini secara bertahap mengintegrasikan lebih banyak elemen dari intervensi militer multinasional dalam menanggapi Resolusi

⁴ <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/206283-obama--khadafi-melanggar-norma>

⁵ *United States Activities in Libya*" [pdf].

Dewan Keamanan PBB 1973. Sehingga pada perkembangannya semakin banyak negara yang tergabung dalam operasi ini, namun meskipun begitu operasi ini masih dianggap operasi militer AS semata, mengingat AS menjadi komando utamanya. Kelemahan dari Operation Odyssey Dawn (OOD) ini dijelaskan oleh Quartararo et al. (n.d: 145) sebagai: “*U.S. solo intervention in Libya could be perceived by some in the Muslim world community as another U.S. attack on Islam.* Hal ini mengingat AS disini dianggap oleh dunia internasional sebagai satu-satunya aktor dalam operasi yang dijalankannya tersebut.

Resolusi tersebut secara khusus berisi:

- 1) Menyerukan gencatan senjata dan mengakhiri semua tindakan penyerangan melawan rakyat sipil;
- 2) Memberi otoritas bagi negara-negara anggota PBB untuk melakukan tindakan, baik secara nasional maupun melalui organisasi dan perjanjian regional, untuk melindungi rakyat sipil dari ancaman penyerangan, termasuk di Benghazi;
- 3) Resolusi khusus tidak termasuk pembentukan pendudukan kekuatan asing dalam bentuk apapun di seluruh bagian wilayah Libya;
- 4) Menyerukan negara-negara anggota Liga Arab untuk bekerjasama dalam implementasi resolusi PBB ini;
- 5) Memberi otoritas pembentukan *no-fly zone* di wilayah udara Libya, namun tidak termasuk larangan penerbangan dengan tujuan bantuan kemanusiaan

dan evakuasi warga negara asing.⁶ Sistem kerja dari Operation Odyssey Dawn sendiri menurut Gretler adalah “*operations in Operation Odyssey Dawn included strikes on “mechanized forces, artillery...those mobile surface-to-air missile sites, interdicting their lines of communications which supply their beans and their bullets, their command and control and any opportunities for sustainment of that activity” when forces were “attacking civilian populations and cities”*”.⁷

2. Intervensi Amerika terhadap konflik di Libya

Pada dasarnya, merujuk pada faktor *domestic structure*, ada beberapa alasan yang mendasari tindakan *humanitarian intervention* Amerika Serikat di Libya. Faktor utamanya adalah kepentingan nasional Amerika terkait ekonomi dan geopolitik. Pertama, hubungan Amerika Serikat dan Libya yang tidak baik, terutama pada saat kepemimpinan rezim Qadhafi. Hal ini dikarenakan Qadhafi memiliki cita-cita pembentukan negara Uni-Afrika yang bertujuan membuat negara-negara Afrika lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan asing, sehingga Amerika Serikat melihat ide Qadhafi ini sebagai ancaman kekuasaan Amerika atas negara-negara di Afrika. Selain itu, Qadhafi dianggap sukses membawa Libya pada perkembangan ekonomi dengan membuat sistem pengairan yang menyebabkan membaiknya hasil

⁶ Taylor, Claire, dan Smith, Ben, 2011. “*Military Operation in Libya*” [pdf]. dalam http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Military_Operations_in_Libya.pdf

⁷ Gertler, Jeremiah, 2011. “*Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress*” [pdf]. dalam <http://fas.org/sgp/crs/natsec/R41725.pdf>

produksi pertanian, sehingga Libya tidak perlu lagi banyak mengimpor bahan-bahan makanan dari negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Alasan terakhir adalah karena sumber daya minyak yang dimiliki oleh Libya yang akan sangat menguntungkan apabila Amerika dapat menguasai cadangan minyak tersebut. Oleh karena itu, adanya krisis politik di Libya ini dianggap sebagai momentum yang tepat bagi Amerika Serikat untuk menyingkirkan rezim Qadhafi, lalu menanamkan kekuatan sebesar-besarnya di Libya.

Keputusan Amerika Serikat melakukan intervensi tidak terlepas dari aset dan kekuatan militer yang kuat yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai fasilitas untuk melakukan operasi militer. Misalnya, dalam *Operation Odyssey Dawn*, angkatan udara Amerika memiliki beberapa aset, seperti: *B-2 stealth bombers from the 509th Bomb Wing at Whiteman Air Force Base, MO; F-15Es from the 492nd Fighter Squadron and 494th Fighter Squadron at RAF Lake heath, Britain; F-16CJ defense-suppression aircraft from the 480th Fighter Squadron at Spang dahlem Air Base, Germany; EC-130 Commando Solo psychological operations aircraft from the 193rd Special Operations Wing, Pennsylvania Air National Guard, Middletown, PA; KC-135s of the 100th Air Refueling Wing at RAF Milde nhall, Britain and the 92nd Air Refueling Wing, Fairchild AFB, WA; C-130Js from the 37th Airlift Squadron at Ramstein Air Base, Germany; A-10 attack fighters; AC-130 gunships*. Selain itu, angkatan laut Amerika juga memiliki kapal perang dan kapal selam yang lengkap dan canggih.

Sedangkan merujuk pada situasi internasional, dalam Kongres Komite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang dilaksanakan pada 31 Maret 2011 terkait dengan *Operation Odyssey Dawn* dan operasi militer Amerika di Libya, Adam Smith, perwakilan dari Washington sebagai anggota Komite Angkatan Bersenjata, menyatakan bahwa ada beberapa situasi yang menjadi alasan intervensi Amerika di Libya tersebut, yakni:

- 1) Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Khaddafi terhadap rakyat Libya, sehingga Amerika memiliki kewajiban untuk menghentikan serangan tersebut sebagai tujuan jangka pendek. *“Colonel Qadhafi was rolling back the rebellion and killing many civilians, and there was every reason to believe that he would continue to do that, and they were unable to defend themselves”*;
- 2) Adanya dukungan dari masyarakat internasional dalam aksi melawan Khaddafi, termasuk dukungan penuh dari PBB, Liga Arab, dan NATO. Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat sipil di Libya dan untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim khaddafi.

Alasan lain yang dapat menjelaskan Intervensi AS ke Libya disebutkan oleh Lindstrom dan Zetterlund (2012: 46-47) dilaterbelakangi oleh beberapa alasan.

Pertama, alasan yang paling jelas terkait intervensi AS ke Libya adalah masalah kewajiban moral. Mengingat terjadi krisis kemanusiaan yang dilakukan oleh

Qadhafi terhadap penduduk sipil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dari presiden Obama dalam pidatonya sebagai penerima *Nobel Peace Prize* yang berbunyi: *“there will be times when nations acting individually or in concert will find the use of force not only necessary but morally justified”*.

Kedua, intervensi dari AS bertujuan untuk mendapatkan dukungan internasional. Dimana disini Obama pada tahun 2008 dalam kampanyenya menjelaskan bahwa AS dibawah kepemimpinannya akan menghindari aksi sepihak. Sebagai gantinya, dalam menghadapi krisis internasional AS akan memobilisasi masyarakat internasional dan bekerjasama dengan mitra regional.

Ketiga, beberapa analisis melihat keterlibatan AS di Libya sebagai bentuk *“pay back”* atau balas budi terkait kontribusi Sekutu (Eropa) dalam kasus Afganistan. Hal ini sesuai dengan pernyataan menteri luar negeri Hilary Clinton yang mengatakan bahwa *“we asked our NATO allies to go into Afghanistan with us 10 years ago. They have been there, and a lot of them have been there despite the fact that they were not attacked. The attack came on us...they stuck with us. When it comes to Libya, we started hearing from the UK, France, Italy, other of our NATO allies...this was in their vital national interest...”*.

keempat, seperti yang Presiden Obama telah katakan bahwa intervensi AS di Libya sangat penting untuk kredibilitas dari PBB. Dalam hal ini kelambanan aksi akan beresiko pada penurunan kredibilitas dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri.

Ditambah lagi adanya fakta bahwa Liga Arab selaku organisasi regional telah mendesak masyarakat internasional untuk turun tangan atas kasus yang terjadi di Libya. AS disini melihat kasus Libya sebagai instrumen untuk meningkatkan reputasinya di dunia Arab.

Kelima, motif yang berkontribusi pada keputusan Washington untuk mengintervensi Libya adalah karena Libya dianggap sebagai ancaman dalam menstabilkan kawasan Afrika Utara. Libya sejak tahun 2006 masuk ke dalam daftar negara-negara yang mendukung terorisme dan mengembangkan senjata pemusnah masal menurut AS.

Keenam, terkait permasalahan ekonomi yang didukung oleh argumen dari Madelene Lindstrom dan Kristina Zetterlund (2012: 48) yang mengatakan bahwa: “*at the time of the intervention, Europe received over 85 per cent of Libya’s crude exports. The US, on the other hand, imported 5 per cent of Libyan exports, representing some 0.5 per cent of US total domestic oil consumption. It is of interest to note, however, that the NTC’s first sale of oil was to a US oil refiner*”.⁸

⁸ Committee on Armed Services, 2011. “*Operation Odyssey Dawn and U.S. Military Operations in Libya*” [pdf]. dalam <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hrg65802/pdf/CHRG-112hrg65802.pdf>

3. Amerika pemeran utama intervensi

Adanya serangan pemerintah Khaddafi terhadap warga sipil, yang tidak bersenjata merupakan sebuah kejahatan atas kemanusiaan. Sehingga Amerika Serikat dengan menggunakan dalih Resolusi PBB 1970 dan 1973, mengenai kejahatan perang dan perlindungan terhadap rakyat sipil pada 31 Maret 2011. Berdasarkan resolusi tersebut, NATO juga turun tangan dalam menjaga perdamaian dan demokrasi di Libya dengan menerapkan Embargo senjata, *no-fly zone* dan NATO menurunkan tentaranya dengan alasan perlindungan terhadap serangan maupun ancaman serangan. Namun hal tersebut tidak menghalangi Khadafi untuk menjaga negaranya. Khadafi menggunakan tentara bayaran untuk melawan serangan udara yang dilancarkan oleh NATO. Dan juga untuk melawan NTC (*National Transition Council*) merupakan gerakan rakyat Libya untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan Khadafi. Gerakan transisi nasional Libya tersebut dengan dukungan NATO berhasil memukul Khadafi dan tentara pro-Khadafi diberbagai wilayah dari Tripoli hingga Shirte tempat kelahiran Khadafi. Berbagai *sweeping* terhadap gerakan Khadafi dilancarkan dengan melumpuhkan aset keuangan dan senjata Khadafi di berbagai kota. Bahkan Pesawat AS yang mengawasi udara negara Libya seperti dengan meluncurkan sembilan belas pesawat “*tomhawk*” untuk menyerang pos-pos pertahanan Libya didarat dengan meluncurkan misil sebanyak 194 buah dan dari penyerangan sejak tanggal 19-28

Maret menelan biaya hingga 40 juta dollar bahkan negara-negara barat menelan biaya hingga 30-100 juta dollar per minggu.⁹

Berbagi aktor yang terlibat seperti NATO, Khadafi, NTC hingga Amerika Serikat merupakan “*pemeran utama*” dalam konflik Libya dengan berbagai kepentingan tentunya. Jika dianalisa, Khadafi sebagai aktor utama dibalik semua permasalahan ini dikarenakan sebagai pemimpin tertinggi di negara Libya sikap diktator sebagai pemimpin hingga 42 tahun merupakan sebuah alasan yang tidak dapat dihindari. Membuat negara Libya sebagai negara sosialis dengan kudeta non-militer terhadap pemerintahan sebelumnya. Khadafi muda dianggap sebagai pahlawan, namun seiring berjalannya waktu 42 tahun merupakan angka yang banyak untuk seseorang sebagai pemimpin negara. Namun, jika dicermati lebih jauh dari segi politik luar negeri maupun dalam negeri, negara timur tengah mayoritas dipimpin secara turun temurun dan dalam jangka waktu yang lama namun hal aneh terjadi pada negara timur tengah yang sebelumnya “adem-ayem” diganggu urusan dalam negerinya. Dalih ingin menegakkan demokrasi juga perlu dipertanyakan karena negara seperti Brunei Darussalam yang dipimpin raja secara turun-temurun bahkan juga merangkap jabatan penting lain seperti menteri pertahanan juga tidak dipermasalahkan, permasalahan yang sering digunakan oleh Amerika Serikat itu perlu dicermati. Langkah pihak koalisi masih panjang dalam konflik di Libya ini termasuk langkah Amerika. Langkah yang sebenarnya tidak perlu diambil karena

⁹ Ibid

tidak ada alasan untuk menyerang Libya. Urusan dalam negeri Amerika saja sudah sedemikian banyaknya masih juga mau ditambah lagi dengan urusan lain. Menyerang Libya hanya karena memenuhi permintaan bantuan dari Perancis dan Inggris bukan karena kepentingan Amerika sendiri adalah hal yang sangat tidak bisa dibenarkan.

4. Humanitarian Intervention

Penggulingan rezim khaddafi di Libya bukanlah keputusan spontan oleh kekuatan NATO dalam menanggapi pemerintah Libya yang secara kejam menyerang rakyat mereka sendiri. Sebaliknya, ini adalah bagian dari rencana geostrategis yang jauh lebih megah oleh kekuatan Barat untuk menghancurkan negara-bangsa yang dapat melawan hegemoni Barat.

Libya ditargetkan untuk perubahan rezim dalam rencana 2001 yang beredar di sekitar Pentagon. Rencana tersebut diungkapkan oleh mantan jenderal bintang empat dan mantan komandan NATO, Wesley Clark, dalam sebuah pidato di tahun 2007 di *Commonwealth Club of California di San Francisco*. Clark membacakan sebuah percakapan yang dia lakukan dengan seorang pejabat di Pentagon pada tahun 2001, yang telah menerima sebuah memo rahasia dari kantor Sekretaris Pertahanan: *Saya baru saja mendapat memo ini dari kantor Sekretaris Pertahanan, dikatakan bahwa kita akan menyerang dan menghancurkan pemerintah di tujuh negara dalam lima*

tahun. Kita akan mulai dengan Irak, dan kemudian kita akan pindah ke Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan dan Iran. "

Pada tahun 2014, tiga tahun setelah perang di negara tersebut, Libya bergabung dengan *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*, sebuah organisasi yang merupakan anggota korporat dari salah satu organisasi paling unggul di negara Barat - *Royal Institute of International Affairs* (Atau Chatham House).

Ke depan, EBRD akan menawarkan pinjaman tanpa hutang kepada negara Afrika Utara. Ini akan mengakibatkan Libya menjadi berhutang ke sebuah organisasi yang akan memastikan negara tersebut akan tunduk pada kepentingan imperialisme Barat, sementara mengalami periode kekacauan yang terus berlanjut yang disebabkan oleh perang NATO di tahun 2011. Ini adalah imperialisme abad ke-21.

Jelas bahwa bagi banyak pemimpin politik di ibu kota negara Barat, humanitarianisme hanyalah sebuah eufemisme untuk imperialisme. Elite Barat saat ini secara imajinatif menggunakan propaganda yang sama berulang-ulang untuk membenarkan perang abadi. David Cameron baru-baru ini memuntahkan kembali slogan-slogan yang kami dengar pada awal di tahun 2011, saat dia mengklaim bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad telah "membunuh bangsanya sendiri".¹⁰

¹⁰ <https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle>

Pada tanggal 17 Maret 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973, dipelopori oleh administrasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang memberi wewenang untuk melakukan intervensi militer di Libya. Tujuan, Obama, adalah untuk menyelamatkan nyawa para pemrotes pro-demokrasi yang damai yang menemukan diri mereka sasaran penumpasan oleh diktator Libya Muammar al-Qaddafi. Qaddafi tidak hanya mengancam momentum *Arab Spring* yang baru lahir, yang baru saja menyingkirkan rezim otoriter di Tunisia dan Mesir. Obama juga siap melakukan pertumpahan darah di kota Libya dimana pemberontakan dimulai. .

Dua hari setelah otorisasi PBB, Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya membentuk zona larangan terbang di seluruh Libya dan mulai membom pasukan Qaddafi. Tujuh bulan kemudian, pada bulan Oktober 2011, setelah sebuah kampanye militer yang diperluas dengan dukungan Barat yang berkelanjutan, pasukan pemberontak menaklukkan Libya dan menembak mati Qaddafi. Amerika Serikat berusaha untuk memelihara *Arab Spring*, mencegah terjadinya genosida seperti di Rwanda, dan menghilangkan potensi bahaya terorisme di Libya.
